Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis Volume.4, Nomor. 3 September 2025

e-ISSN: 2808-8980; p-ISSN: 2808-9383, Hal 35-45 DOI: https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5184 Available online at : https://journalcenter.org/index.php/jupsim



Konflik dan Peluang Sosial Ekonomi Akibat Kurangnya Lahan Parkir Karyawan di Lingkungan PT. Adonia Footwear Indonesia

Luthfiah Nur Fatikha

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia

Alamat: Jalan Professor Muhammad Yamin No.22, Trayeman, Kudaile, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: <u>nfluthfiah@gmail.com</u>*

Abstract. This study examines the complex socio-economic dynamics resulting from the limited availability of parking space within the premises of PT Adonia Footwear Indonesia. The imbalance between the high number of employee-owned vehicles and the insufficient parking capacity creates challenges that extend beyond spatial limitations, encompassing issues of safety, user behavior, and the adequacy of supporting infrastructure. In the context of a growing workforce and increasing vehicle ownership, the scarcity of parking facilities has become a pressing concern that requires holistic assessment and problem-solving strategies. The research aims to identify not only the conflicts caused by the shortage of employee parking but also the socio-economic opportunities that arise from this condition. A qualitative descriptive method was applied using a case study approach to capture the detailed and contextual realities of the problem. Data were collected through direct observation, semistructured interviews with employees, company management, and local residents, as well as documentation review. This triangulation of data sources ensured the validity and richness of the findings. The results indicate that the parking shortage has generated friction between employees and residents living near the factory, primarily due to the use of residential areas for overflow parking. Disputes have arisen over blocked access, noise, and security concerns. However, the situation has also fostered new economic activities, particularly the emergence of informal paid parking services managed by local residents, which provide them with additional income. This dual impact highlights the parking issue as both a source of social tension and a driver of communitybased microeconomic opportunities. The study concludes that a collaborative approach between the company and surrounding residents offers a viable and sustainable solution. Initiatives such as formal partnerships for managed parking services, infrastructure improvements, and the implementation of employee vehicle management policies could mitigate conflict while enhancing mutual economic benefits.

Keywords: Community, Companies, Economic opportunities, Parking space, Social conflict

Abstrak. Keterbatasan lahan parkir di lingkungan PT Adonia Footwear Indonesia menimbulkan dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks. Ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan milik ribuan karyawan dan kapasitas lahan parkir yang tersedia menyebabkan perlunya evaluasi tidak hanya terkait kebutuhan ruang, tetapi juga aspek keamanan, perilaku pengguna, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk konflik serta potensi peluang sosial ekonomi yang timbul akibat keterbatasan lahan parkir bagi karyawan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan lahan parkir memicu konflik antara karyawan dan masyarakat sekitar. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penyediaan jasa parkir berbayar oleh warga lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat menjadi alternatif solusi strategis dalam mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan.

Kata kunci: Konflik sosial, Lahan parkir, Masyarakat, Peluang ekonomi, Perusahaan

1. LATAR BELAKANG

PT Adonia Footwear Indonesia merupakan salah satu entitas bisnis yang berada di bawah naungan HuaLi Industrial Group. Perusahaan induknya berbasis di Zhongshan, Guangdong, Tiongkok, yang juga menjadi lokasi kantor pusat manajemen serta pusat pengembangan dan desain. Selain itu, HuaLi memiliki pusat perdagangan di Hong Kong dan

Zhongshan, serta sejumlah anak perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai produsen utama dan mitra strategis bagi sejumlah merek alas kaki olahraga global, HuaLi mengelola PT Adonia Footwear Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Perusahaan ini berfokus pada produksi alas kaki untuk keperluan ekspor, khususnya ke pasar Amerika dan Eropa (LinkedIn, 2023). Dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai ribuan orang, PT Adonia Footwear Indonesia berperan signifikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah Tegal dan sekitarnya (Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024).

Pertumbuhan perusahaan yang pesat tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas fasilitas pendukung, salah satunya adalah penyediaan area parkir bagi karyawan. Keterbatasan ruang parkir kini menjadi permasalahan signifikan dalam tata kelola kawasan industri dan perusahaan berskala besar di Indonesia (SINDOnews.com, 2024). Dalam konteks dunia kerja modern, ketersediaan fasilitas parkir tidak hanya berfungsi sebagai aspek pendukung kenyamanan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kerja, aspek keamanan lingkungan, serta hubungan sosial antara perusahaan dan komunitas sekitar. Ketika kapasitas parkir tidak memadai, khususnya pada perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar, potensi konflik dapat muncul baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal, seperti masyarakat setempat.

Kemajuan suatu perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh peningkatan kapasitas produksi, melainkan juga oleh tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu elemen infrastruktur yang krusial adalah penyediaan lahan parkir bagi karyawan. Isu keterbatasan fasilitas parkir, terutama pada perusahaan berskala besar seperti PT Adonia Footwear Indonesia, tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang dan dominannya penggunaan kendaraan pribadi, minimnya area parkir berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap efisiensi kerja, interaksi sosial di lingkungan perusahaan, serta tingkat produktivitas karyawan secara keseluruhan.

Ketiadaan lahan parkir yang memadai dapat mendorong munculnya praktik parkir sembarangan, meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar, serta menurunkan produktivitas karyawan akibat stres dan keterlambatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa Amelia, Imma Widyawati Agustin, 2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan badan jalan sebagai area parkir dapat menurunkan kapasitas jalan hingga 55%, yang pada gilirannya

memperburuk kondisi lalu lintas dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi bagi lingkungan sekitarnya.

Melihat besarnya jumlah karyawan PT Adonia, letak pabrik yang berada di wilayah semi-perdesaan, serta terbatasnya akses terhadap transportasi umum, permasalahan keterbatasan lahan parkir menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks perumusan kebijakan internal perusahaan terkait pengelolaan parkir, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model kolaboratif berbasis komunitas yang bertujuan meredam potensi konflik sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar.

Kasus serupa pernah terjadi di Kota Palembang, di mana sengketa terkait pengelolaan lahan parkir memicu bentrokan antara otoritas Dinas Perhubungan dan kelompok masyarakat lokal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk motif ekonomi, rendahnya tingkat edukasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola parkir (Syahrullah, 2024). Selain itu, keterbatasan ruang parkir yang tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan yang efektif turut berkontribusi terhadap meningkatnya kemacetan, ketimpangan dalam aksesibilitas, serta munculnya beban biaya sosial yang merugikan secara ekonomi (Litman, 2006).

Meskipun keterbatasan lahan parkir menimbulkan berbagai persoalan, situasi ini juga membuka ruang bagi inovasi, seperti penerapan sistem parkir elektronik, pengembangan kemitraan pengelolaan dengan masyarakat lokal, serta promosi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Beberapa wilayah telah membuktikan bahwa penerapan kebijakan parkir progresif dan sistem zonasi dapat menjadi solusi efektif untuk meredam konflik serta meningkatkan penerimaan retribusi bagi pemerintah daerah (Elin Diyah Syafitri, 2019). Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk konflik yang timbul serta mengidentifikasi potensi peluang sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan dari permasalahan keterbatasan parkir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Parkir

Parkir merupakan aktivitas menghentikan kendaraan dalam waktu tertentu di suatu lokasi, baik di dalam maupun di luar badan jalan, bukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang melainkan untuk ditinggalkan oleh pengemudinya (Dirjen, 1996). Dalam konteks perusahaan, penyediaan fasilitas parkir menjadi bagian integral dari sarana pendukung operasional yang mendukung efisiensi, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas kerja.

Parkir Liar dan Dampaknya

Parkir liar merujuk pada praktik memarkir kendaraan di area yang tidak diperuntukkan atau tidak memiliki izin resmi, seperti di trotoar, pinggir jalan, atau lahan milik publik dan privat (Annisa Amelia, Imma Widyawati Agustin, 2016). Praktik ini muncul karena kurangnya fasilitas parkir resmi serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Parkir liar tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga memicu konflik sosial, menurunkan kualitas ruang publik, dan meningkatkan potensi kecelakaan (Litman, 2006).

Kebutuhan dan Kebijakan Parkir di Lingkungan Perusahaan

Kebutuhan parkir di perusahaan harus disesuaikan dengan jumlah karyawan, luas lahan, dan jenis kendaraan yang digunakan. Perusahaan berskala besar, seperti PT Adonia Footwear Indonesia, memerlukan kebijakan parkir yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sekitar. Penerapan sistem zonasi, kemitraan dengan warga, dan penggunaan teknologi digital dapat menjadi alternatif solusi yang adaptif (Elin Diyah Syafitri, 2019).

Biaya Sosial dan Ekonomi Akibat Keterbatasan Parkir

Keterbatasan fasilitas parkir membawa implikasi terhadap biaya sosial, yakni kerugian kolektif yang dialami masyarakat akibat gangguan aktivitas publik, kemacetan, dan penurunan kualitas hidup (Litman, 2006). Selain itu, terdapat pula biaya ekonomi yang mencakup kehilangan waktu produktif, pemborosan bahan bakar, serta penurunan efisiensi kerja. Parkir yang tidak dikelola secara sistematis juga menyebabkan potensi hilangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi (Syahrullah, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam bentuk konflik serta peluang sosial ekonomi yang muncul akibat keterbatasan lahan parkir di lingkungan PT Adonia Footwear Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, serta pengalaman subjektif dari informan yang terlibat langsung dalam fenomena yang dikaji (Aulia Shabrinawati, 2016). Moleong (2017) menyatakan bahwa, pendekatan kualitatif bertujuan memahami realitas sosial dari perspektif subjek penelitian dalam konteks alami dan tidak dimanipulasi. Penelitian ini bersifat induktif, dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kerja dan area sekitar PT Adonia Footwear Indonesia, yang beralamat di Jalan Pesawahan, Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode Mei hingga Juli 2025. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung seperti dokumentasi visual (foto lokasi), artikel berita, jurnal ilmiah, serta informasi dari situs resmi perusahaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi langsung di lingkungan sekitar PT Adonia Footwear Indonesia untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi lapangan. Teknik wawancara digunakan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih terbuka namun tetap terarah, sehingga memungkinkan peneliti menangkap pendapat informan secara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu: informan kunci yang merupakan karyawan perusahaan yang memanfaatkan lahan parkir resmi dari perusahaan; informan utama yakni warga sekitar yang menjadikan halaman rumahnya sebagai area parkir alternatif; serta informan pendukung yaitu karyawan yang memarkirkan kendaraannya di lahan parkir milik warga (Nafisa, 2024). Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder dan bukti visual seperti foto lokasi guna mendukung deskripsi situasional penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Matthew B. Miles, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Konflik Akibat Keterbatasan Lahan Parkir



Hasil wawancara dengan sejumlah karyawan, warga sekitar, dan pihak manajemen perusahaan menunjukkan bahwa keterbatasan lahan parkir di PT Adonia Footwear Indonesia telah memicu munculnya berbagai bentuk konflik yang bersifat simultan dan kompleks. Affrt

(2022) menyatakan bahwa, salah satu bentuk konflik yang menonjol terjadi di antara sesama karyawan, khususnya pada jam kedatangan pagi hingga siang hari. Pada waktu-waktu tersebut, persaingan untuk memperoleh tempat parkir menjadi intens, sehingga karyawan yang datang terlambat sering kali tidak memperoleh lahan parkir yang memadai. Akibatnya, mereka terpaksa memarkirkan kendaraan di lokasi yang jauh dari area perusahaan atau di tempattempat yang tidak memiliki izin resmi.

Selain konflik internal antar karyawan, permasalahan keterbatasan lahan parkir juga memicu ketegangan antara karyawan dan warga sekitar. Beberapa karyawan memilih memarkirkan kendaraannya di depan rumah warga karena tidak tersedianya ruang parkir yang memadai di lingkungan perusahaan. Tindakan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga, terutama ketika akses ke rumah mereka terhalangi atau merasa bahwa hak atas ruang privat dan lingkungan terganggu. Ketegangan semakin meningkat ketika praktik tersebut dilakukan secara berulang tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik rumah (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023). Di sisi lain, muncul pula ketidakpuasan dari pihak karyawan terhadap manajemen perusahaan yang dinilai belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai, serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya celah komunikasi antara pihak perusahaan dan karyawan yang berpotensi memperbesar konflik dalam lingkungan kerja.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Soekanto, 2012) dalam teori konflik sosial, yang menjelaskan bahwa konflik muncul ketika terjadi ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Dalam konteks penelitian ini, konflik terjadi karena jumlah lahan parkir yang tersedia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna, sehingga memicu persaingan dan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dampak Sosial Ekonomi yang Dirasakan

Keterbatasan lahan parkir di lingkungan perusahaan tidak hanya menimbulkan gangguan pada aspek operasional, tetapi juga berdampak signifikan terhadap dimensi sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- Dampak sosial internal: Penurunan motivasi kerja, meningkatnya tingkat stres akibat kesulitan mencari tempat parkir sebelum memulai aktivitas kerja, serta terganggunya hubungan antar karyawan yang semula harmonis.
- Dampak sosial eksternal: Ketegangan dengan warga sekitar, rusaknya hubungan sosial antara perusahaan dan komunitas local.

• **Dampak ekonomi:** Kehilangan potensi kerja tepat waktu, munculnya denda atau kerugian akibat parkir di lokasi yang tidak resmi, hingga turunnya tingkat produktivitas karyawan secara keseluruhan.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori eksternalitas ekonomi yang dikemukakan oleh Mankiw (1998) yang menyatakan bahwa, aktivitas ekonomi suatu pihak dapat memberikan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap pihak lain di luar mekanisme pasar. Dalam konteks ini, keterbatasan lahan parkir di perusahaan memberikan efek negatif terhadap masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh aktivitas parkir karyawan di luar area resmi.

Peluang Sosial Ekonomi yang Muncul

Di balik munculnya konflik akibat keterbatasan lahan parkir, terdapat pula potensi sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekita, antara lain:

- Warga menyediakan lahan parkir berbayar: Dimana sebagian penduduk memanfaatkan halaman rumahnya untuk disewakan kepada karyawan sebagai tempat parkir, baik dengan sistem harian maupun bulanan. Inisiatif ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.
- **Kemitraan pengelolaan parkir:** Mulai berkembang gagasan dari pihak perusahaan untuk menjalin kemitraan pengelolaan parkir bersama komunitas, seperti warga lokal atau koperasi internal, dalam rangka menciptakan sistem parkir berbasis partisipatif.
- **Peluang usaha mikro:** Tumbuhnya usaha mikro di sekitar area parkir alternatif, seperti warung makanan, pedagang minuman ringan, hingga jasa tambal ban, yang semuanya tumbuh berkat tingginya mobilitas karyawan di kawasan tersebut.

Di samping menimbulkan konflik, keterbatasan lahan parkir di sekitar PT Adonia Footwear Indonesia juga membuka peluang ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar. Salah satu narasumber yang berdomisili di sekitar kawasan perusahaan mengungkapkan bahwa pada awalnya ia merasa terganggu oleh keberadaan kendaraan karyawan yang diparkir secara sembarangan di depan rumahnya. Namun, dalam perkembangannya, ia bersama keluarganya memutuskan untuk memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat parkir bagi karyawan, khususnya sepeda motor. Inisiatif ini kemudian menjadi sumber penghasilan tambahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pembelian bahan pokok. Praktik tersebut menunjukkan adanya respons adaptif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan fasilitas perusahaan dengan cara yang produktif secara ekonomi (I Wayan Sui Suadnyana, 2024).

Fenomena tersebut mencerminkan prinsip shared economy sebagaimana dikemukakan oleh Rogers (2010) yakni, bentuk kolaborasi sosial di mana individu atau komunitas memaksimalkan pemanfaatan aset yang sebelumnya kurang produktif. Dalam konteks ini, halaman rumah yang awalnya tidak dimanfaatkan secara ekonomi diubah menjadi sumber pendapatan melalui penggunaan bersama sebagai lahan parkir oleh karyawan Perusahaan.

Respon dan Strategi Solusi

Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang, seperti:

- Menyediakan *shuttle bus* dari titik parkir bersama di area yang lebih luas.
- Mengatur jadwal shift parkir sesuai jam kerja untuk mengurangi tumpang tindih.
- Menjalin *kerja sama formal* dengan warga pemilik lahan.
- Memberikan *subsidi parkir* melalui koperasi karyawan.

Namun, strategi ini masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Analisis Kritis

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan keterbatasan lahan parkir tidak dapat direduksi sekadar sebagai isu teknis atau logistik, melainkan merupakan persoalan sosial yang kompleks, karena melibatkan dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta klaim atas ruang publik dan privat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang muncul memerlukan pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, di mana seluruh pemangku kepentingan—baik perusahaan, karyawan, maupun masyarakat sekitar—berperan aktif dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan dalam konteks kawasan industri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan lahan parkir di kawasan PT Adonia Footwear Indonesia memicu berbagai bentuk konflik sosial, baik di lingkup internal antar karyawan maupun eksternal antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Akar permasalahan tersebut terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang digunakan oleh karyawan dan kapasitas parkir yang tersedia, yang diperburuk oleh ketiadaan kebijakan pengelolaan parkir yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun memicu konflik, keterbatasan lahan parkir juga membuka peluang sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti penyediaan lahan parkir alternatif, jasa penitipan kendaraan, usaha warung, hingga layanan perawatan sepeda motor. Jika dikelola melalui pendekatan kolaboratif antara perusahaan, karyawan, dan warga, kondisi ini justru berpotensi menjadi solusi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat relasi sosial dan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.

Temuan penelitian ini mempertegas relevansi penerapan teori konflik sosial, konsep eksternalitas ekonomi, serta pendekatan partisipatif sebagai landasan analitis dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait pemanfaatan ruang komunal di lingkungan kawasan industri.

Saran

Bagi Perusahaan:

- Perusahaan disarankan untuk segera merumuskan kebijakan pengelolaan parkir yang melibatkan koperasi karyawan atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dalam bidang pengelolaan fasilitas.
- Diperlukan pemetaan ulang terhadap tata guna lahan di lingkungan perusahaan, dengan mempertimbangkan perluasan area parkir sebagai bagian integral dari strategi manajemen sumber daya manusia.
- Membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif bersama masyarakat sekitar guna merumuskan solusi kolaboratif yang menguntungkan semua pihak.

Bagi Masyarakat Sekitar:

- Masyarakat di sekitar perusahaan diharapkan dapat mengelola potensi ekonomi dari lahan yang dimiliki secara legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
- Disarankan untuk membangun kemitraan formal dengan pihak perusahaan dalam sistem pengelolaan parkir, sehingga tercipta mekanisme yang tertib, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Daerah:

- Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan dan mendorong penerapan regulasi parkir yang adil dan adaptif di kawasan industri, termasuk memberikan insentif bagi inisiatif kerja sama antara masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan fasilitas parkir.
- Memfasilitasi forum komunikasi antara pihak perusahaan dan warga sekitar, guna mencegah potensi konflik serta merancang solusi berbasis kolaborasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrt. (2022). Dimulai dengan penyusunan kebijakan parkir karyawan. https://www.affrt.com/id/drafting-an-employee-parking-policy.html?utm_source=chatgpt.com
- Amelia, A., Agustin, I. W., & Mulyono, D. M. U. (2016). Pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja jalan di Jalan Kawi Atas dan Jalan Gatot Subroto Kota Malang. Eternitas: Jurnal Teknik Sipil, 2(1), 40–49. https://doi.org/10.30822/eternitas.v2i1.1756
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1996). Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir departemen. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 5(1), 261–267. https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3281
- LinkedIn. (2023). PT. Adonia Footwear Indonesia Shoe manufacturer (HuaLi Industrial Group). https://www.linkedin.com
- Litman, T. (2006). "Efficiency-equity-clarity" parking management strategies, evaluation and planning. Victoria Transport Policy Institute. www.vtpi.org
- Mankiw, N. G. (1998). Teaching principles of economics.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2023). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. In Experiencing citizenship: Concepts and models for service-learning in political science (pp. 109–118). https://doi.org/10.4324/9781003444718-9
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif.
- Nafisa. (2024). Analisis studi kasus: Pendekatan wawancara dalam penelitian. Solusi Jurnal. https://solusijurnal.com/analisis-studi-kasus-pendekatan-wawancara-dalam-penelitian/?utm_source=chatgpt.com
- Oktavira, B. A., & Herlambang, S. (2023). Hukumnya parkir sembarangan di depan rumah tetangga. Hukum Online.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/parkir-didepan-rumah-yang-menganggu-kenyamanan-lt508905b609bf6/?utm_source=chatgpt.com
- Rogers, R., & Botsman, R. (2010). What's mine is yours. Trends in Genetics, 16(September), 6. https://doi.org/10.1016/s0168-9525(00)00086-x

- Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. (2024). Pembangunan pabrik sepatu senilai 220 juta USD di Warureja serap 45 ribu tenaga kerja. https://setda.tegalkab.go.id/2023/12/23/pembangunan-pabrik-sepatu-senilai-220-juta-usd-di-warureja-serap-45-ribu-tenaga-kerja/
- Shabrinawati, A., & Supriyadi, D. (2016). Kajian perilaku masyarakat terhadap keterbatasan lahan parkir pada kawasan komersial di koridor Jalan Tlogosari Raya, Kota Semarang.
- SINDOnews.com. (2024). Tak sediakan parkir karyawan, pengelola gedung kawasan Senopati kena sentil Sudin Perhubungan. https://daerah.sindonews.com/read/1416739/171/tak-sediakan-parkir-karyawan-pengelola-gedung-kawasan-senopati-kena-sentil-sudin-perhubungan-1721120848?utm_source=chatgpt.com
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar.
- Suadnyana, I. W. S., & Kusumadewi, N. M. L. K. P. (2024). Warga sekitar Art Center kantongi cuan ratusan ribu per hari dari parkir PKB. Detikbali. https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7416327/warga-sekitar-art-center-kantongi-cuan-ratusan-ribu-per-hari-dari-parkir-pkb?utm_source=chatgpt.com
- Syafitri, E. D. (2019). Kajian preferensi stakeholder terhadap kebijakan jalan berbayar dan parkir progresif: Studi kasus di wilayah urban dan sub-urban, Kota Balikpapan.
- Syahrullah, R. (2024). Konflik perebutan lahan parkir di Sekanak yang memicu bentrok antara Dinas Perhubungan dengan sejumlah kelompok. Indonesian Journal of Social Development, 1(2), 1–8. https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1878